

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Negara Indonesia

Penulis menyajikan gambaran umum yang meliputi kondisi Geografis, kondisi ekonomi di 33 provinsi Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik D.I.Y 2016

Gambar 4. 1
Peta Negara Indonesia

Berdasarkan Gambar 4.1 negara Indonesia terletak pada Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat setrategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada persimpangan lalu lintas dunia. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa

depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Negara Indonesia berada di 6o LU (Lintang Utara) -11o LS (Lintang Selatan) dan antara 95o BT (BujurTimur) -141o BT (Bujur Timur). Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Indonesia berada di kawasan tropis, hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi dua kali pergantian musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan hujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya dilimpahi alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur. Flora dan fauna juga sangat beraneka ragam.Sedangkan pengaruh dari letak dilihat dari garis bujur, maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi tiga daerah waktu yaitu Indonesia bagian timur (WIT), Indonesia bagian tengah(WITA), dan Indonesia bagian barat(WIB).Total luas wilayah indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi *Eksklusif* (ZEE) terdiri dari:

Tabel 4. 1
Luas Wilayah 33 provinsi di Indonesia

NO	Nama Provinsi	Luas Wilayah(km2)
1	Aceh	58.375,63
2	Sumatra Utara	72.981,23
3	Sumatra Barat	42.297,30
4	Riau	87.023,66
5	Kepulauan Riau	253.420
6	Jambi	53.435,92
7	Sumatra Selatan	87.017,41
8	Bangka Belitung	16.493,54
9	Bengkulu	19.788,70
10	Lampung	35.376,50

NO	Nama Provinsi	Luas Wilayah(km2)
11	DKI Jakarta	664,01
12	Jawa Barat	35.377,76
13	Banten	9.662,92
14	Jawa Tengah	32.800,69
15	DI Yogyakarta	3.133,15
16	Jawa Timur	47.799,75
17	Bali	5.780,06
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10
20	Kalimantan Barat	147.307,00
21	Kalimantan Tengah	153.564,50
22	Kalimantan Selatan	38.744,23
23	Kalimantan Timur	129.066,64
24	Sulawesi Utara	13.851,64
25	Sulawesi Barat	16.787,18
26	Sulawesi Tengah	61.841,29
27	Sulawesi Tenggara	38.067,70
28	Sulawesi Selatan	46.717,48
29	Gorontalo	11.257,07
30	Maluku	46.914,03
31	Maluku Utara	31.982,50
32	Papua	319.036,05
33	Papua Barat	99.671,63
Luas Indonesia		2.011.519,35

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I.Y 2016

Kondisi Infrastruktur Indonesia berdasarkan *The Global Competitiveness Report* (2013/2014) yang dibuat oleh *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia (*Global Competitiveness Index-GCI*) berada pada peringkat ke-38 dunia. Sementara itu kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-61 dari 148 negara dunia yang disurvei atau berada pada peringkat ke 5 diantara negara-negara inti ASEAN. Daya saing global Indonesia periode 2014-2015 meningkat empat peringkat dari sebelumnya 38 menjadi 34. Sedangkan dari segi infrastruktur dan konektivitas, ranking Indonesia meningkat dari ranking ke-61 menjadi ranking ke-56. Hal ini berarti menunjukkan peningkatan lima angka dari tahun kemarin atau dua puluh angka sejak 2011 (Bank Indonesia, 2015). Salah

satu ketersediaan infrastruktur yang dianggap masih kurang seperti pelabuhan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas. Masih kurangnya infrastruktur pada pelabuhan ini membuat biaya logistik di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Proses arus barang yang masuk dan keluar dari dalam negeri ke luar negeri, ataupun antar pulau menjadi terhambat dan biaya logistik semakin membengkak. Jika hal semacam ini tidak segera diatasi, maka investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia akan memilih untuk negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam dengan fasilitas infrastruktur dan kawasan industri yang lebih memadai.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika terjadi pertumbuhan positif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sebaliknya apabila menunjukkan negatif, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan perekonomian dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan pertumbuhan ekonomi juga disebabkan dengan pendapatan setiap daerah. Pembangunan yang tinggi di daerah itu maka nilai pertumbuhan ekonomi akan

naik. PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan Bruto yang berada di suatu provinsi. PDRB berpengaruh pada suatu perekonomian dengan cara mendistribusikan pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. Pembangunan disuatu daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun di setiap tahunnya.

Tabel 4. 2
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Harga
Konstan Menurut
Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)

N O	Nama Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Aceh	104874.21	108914.28	111992.28	113836.05	112672.44
2	Sumtara	353147.59	375924.14	398779.25	419649.28	440955.85
3	Sumbar	111679.49	118724.42	125874.70	133240.30	140529.15
4	Riau	410215.84	425626.00	436206.00	447616.23	448936.60
5	Jambi	97740.87	104615.08	112008.70	120696.23	125038.71
6	Sumsel	206360.70	220459.20	232353.63	243228.57	254022.86
7	Bengkulu	30295.05	32363.04	34329.79	36215.78	38067.50
8	Lampung	160437.50	170769.21	180636.66	189809.46	199525.42
9	Kep.Bangka	38013.99	40104.91	42198.23	44171.62	45961.46
10	Kep. Riau	118961.42	128034.97	137134.85	147167.57	155162.64
11	DKI Jakarta	1147558.23	1222527.92	1297195.43	1374348.61	1454102.11
12	Jawa Barat	965622.06	1028409.74	1093585.51	1148948.82	1207001.49
13	Jawa Tengah	656268.13	691343.12	726899.71	766271.77	806609.02
14	DIYogyakarta	68049.87	71702.45	75637.01	79557.25	83461.57
15	Jawa Timur	1054401.77	1124464.64	1192841.86	1262700.21	1331418.24
16	Banten	290545.84	310385.59	332517.42	350699.73	367959.22
17	Bali	99991.63	106951.46	114109.33	121777.64	129137.91
18	NTB	67379.14	66340.81	69755.56	73285.09	43846.61
19	NTT	46334.13	48863.19	51512.25	54108.48	88866.75
20	KalBar	90797.59	96161.93	101970.46	107092.03	112261.17
21	KalTeng	60492.93	64649.17	69420.99	73734.87	78890.00
22	KalSel	91252.13	96697.84	101879.38	106820.72	110890.73
23	Kaltim	445264.42	469646.25	438354.72	444494.31	439716.08
24	Sultara	54910.90	58677.59	62422.63	66358.76	70418.81
25	Sulteng	56833.83	62249.53	68191.86	71677.65	82829.23
26	Sulsel	185708.47	202184.59	217618.45	234083.97	250729.56

N O	Nama Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
27	Sulteng	53546.69	59785.40	64273.78	68298.72	72988.30
28	Gorontalo	16669.09	17987.07	19369.15	20781.31	22070.45
29	Sulbar	19027.50	20786.89	22229.24	24169.34	25983.38
30	Maluku	19597.39	21000.08	22104.14	23585.07	24843.65
31	Maluku Utara	16002.45	17120.07	18211.29	19211.94	20377.47
32	Papua Barat	42867.19	44423.34	47705.86	50272.01	52347.42
33	Papua	106066.72	107890.94	116428.61	120216.97	131270.88

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I.Y 2016

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan pertumbuhan PDRB provinsi atau daerah. Jumlah PDRB dari 33 provinsi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Setiap provinsi juga memiliki nilai PDRB yang berbeda-beda. Provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi diperoleh provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dengan PDRB per kapita lebih dari 1000 miliar. Tingginya nilai PDRB di provinsi tersebut dikarenakan tingginya nilai perekonomian dan banyaknya pabrik yang dapat meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pada provinsi kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Papua memiliki PDRB yang sedang. Sedangkan provinsi paling rendah adalah Provinsi Maluku Utara dengan nilai PDRB kurang dari 50 miliar rupiah.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu faktor yang membentuk kualitas sumber daya manusia. Angka melek huruf yang baik dengan pelaksanaan yang benar dan berkualitas tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan nasional/daerah. Setiap daerah memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda. Salah satu cara untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu daerah adalah dengan melihat angka Angka Melek Huruf (AMH) dari daerah tersebut. Angka melek huruf dihitung berdasarkan banyaknya jumlah

proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca-menulis di suatu daerah. Berikut ini merupakan data AMH penduduk Indonesia pada tahun 2011-2015 berdasarkan provinsi.

Tabel 4.3
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 (Persen)

No	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Aceh	95.84	96.11	96.66	98.25	97.63
2	Sumtara	96.83	97.35	97.81	98.57	98.68
3	Sumbar	96.20	96.67	97.38	98.44	98.59
4	Riau	97.61	97.79	97.88	98.75	98.87
5	Jambi	97.67	97.80	96.72	97.94	97.84
6	Sumsel	95.52	95.97	97.24	98.14	98.22
7	Bengkulu	96.65	96.90	96.48	97.52	97.63
8	Lampung	95.60	95.88	95.81	97.46	96.67
9	Kep.Bangka	95.13	95.69	96.41	97.60	97.63
10	Kep. Riau	95.02	95.13	97.91	98.83	98.79
11	DKI Jakarta	98.83	99.07	99.14	99.54	99.59
12	Jawa Barat	95.96	96.18	96.70	97.96	98.01
13	Jateng	96.25	96.51	91.27	94.45	93.12
14	DIY	90.34	90.45	92.82	96.87	94.50
15	Jawa Timur	91.49	92.02	90.14	93.18	91.47
16	Banten	88.52	89.28	96.64	97.90	97.37
17	Bali	89.17	90.17	90.84	93.54	92.77
18	NTB	83.24	83.68	84.67	88.11	86.97
19	NTT	87.63	88.73	90.36	92.80	91.45
20	Kalbar	90.03	91.13	91.34	93.47	92.32
21	Kalteng	96.86	97.48	97.93	98.82	98.88
22	Kalsel	95.66	96.43	97.04	98.19	98.21
23	Kaltim	96.99	97.55	97.51	98.59	98.69
24	Sultar	98.85	98.85	99.13	99.60	99.53
25	Sulteng	94.69	95.22	95.95	97.08	97.34
26	Sulsel	94.51	94.95	90.16	92.81	91.29
27	Sulgara	88.07	88.73	92.61	94.03	94.10
28	Gorontalo	87.61	88.79	96.83	97.90	98.24
29	Sulbar	91.29	91.49	90.79	93.86	92.64

No	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
30	Maluku	96.63	97.08	97.83	98.77	98.85
31	Malukutara	96.01	96.43	97.37	98.36	98.49
32	Papua Barat	64.08	65.69	95.59	96.75	96.88
33	Papua	92.41	94.74	67.31	70.92	70.83

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I.Y 2016

Dari Tabel 4.3 menyebutkan bahwa perkembangan angka melek huruf Indonesia untuk usia penduduk 15 tahun keatas setiap provinsi rata-rata terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang lajunya mencapai sekitar 1,41% pertahun. Namun, terlihat mulai tahun 2011 sampai tahun 2015, angka melek huruf Indonesia relatif berfluktuatif. Pada nilai angka melek huruf ini perlu dipahami penyebabnya dengan beberapa kemungkinan. Seseorang tidak terhitung buta huruf apabila tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, baik latin maupun huruf lainnya. Nilai angka melek huruf tertinggi di provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Tingginya nilai angka melek huruf karena di provinsi tersebut rata-rata perekonomian seseorang diatas rata2 dan pengetahuan tentang pendidikan untuk kedepannya lebih menguasai. Pada nilai angka melek huruf paling rendah di provinsi Papua Barat. Penyebab rendahnya angka melek huruf disebabkan kurangnya sarana prasana dalam pendidikan di provinsi tersebut.

Pada tahun 2013 berdasarkan data Statistik Indonesia menyebutkan, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sebesar 93.92 persen. Persentase angka melek huruf di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan dipedesaan. Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan

golongan usia, di perkotaan persentase terkecil berada pada usia 10 sampai 14 tahun dan terbesar pada golongan usia 15 sampai 19 tahun. Artinya, di perkotaan, penduduk yang bisa membaca dan menulis sudah bertambah banyak, kemudian semangat penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis sudah berkurang. Sementara itu, di pedesaan, persentase angka melek huruf paling kecil pada golongan usia 15-19 tahun dan terbesar di golongan usia 10-14 tahun. Artinya, angka melek huruf penduduk di pedesaan yang usia 15-19 tahun masih banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Kondisi inilah yang menyebabkan AMH terus naik.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan penduduk, memegang peranan penting, karena ia menyediakan tenaga usahawan yang diperlakukan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Kenaikan jumlah tenaga kerja ini dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi di Indonesia yang semakin membaik, pembangunan ekonomi tersebut mampu mengurangi angka pengangguran nasional.

Tabel 4. 4
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015 (Juta)

NO	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Aceh	1852473	1798547	1824586	1931823	1966018
2	Sumtara	5912114	5751682	5899560	5881371	5962304
3	Sumbar	2070725	2037642	2005625	2180336	2184599
4	Riau	2424180	2399002	2481361	2518485	2554296
5	Jambi	1434998	1423624	1482471	1491038	1550403
6	Sumsel	3553104	3532932	3464620	3692806	3695866

NO	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
7	Bengkulu	873719	830266	801146	868794	904317
8	Lampung	3482301	3449307	3385046	3673158	3635258
9	Kep.Bangka	781824	824567	596786	604223	623949
10	Kep. Riau	589634	583102	848660	819656	836670
11	DKI Jakarta	4588418	4838596	4712836	4634369	4724029
12	Jawa Barat	17454781	18321108	18413984	19230943	18791482
13	Jateng	15916135	16132890	15964048	16550682	16435142
14	DIY	1798595	1867708	1847070	1956043	1891218
15	Jawa Timur	18940340	19081995	19266457	19306508	19367777
16	Banten	4529660	4605847	4637019	4853992	4825460
17	Bali	2204874	2268708	2273897	2272632	2324805
18	NTB	1962240	1978764	1981842	2094100	2127503
19	NTT	2096259	2095683	2075948	2174228	2219291
20	Kalbar	2146572	2106514	2053823	2226510	2235887
21	Kalteng	1105701	1070210	1063711	1154489	1214681
22	Kalsel	1824929	1821327	1811096	1867462	1889502
23	Kaltim	1591003	1619118	1624272	1677466	1423957
24	Sultar	990720	957292	946852	980756	1000032
25	Sulteng	1260999	1165442	1175930	1293226	1327418
26	Sulsel	3375498	3351908	3291280	3527036	3485492
27	Sulgara	1026548	975879	968949	1037419	1074916
28	Gorontalo	445210	445729	449104	479137	493687
29	Sulbar	536048	548783	523960	595797	595905
30	Maluku	650112	610362	598792	601651	655063
31	Malukutara	437870	443943	445358	459017	482543
32	Papua Barat	336588	341741	353619	378436	380226
33	Papua	1476227	1527933	1634332	1617437	1672480

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I.Y 2016

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Indonesia menurut provinsi daerah masing masing setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun terdapat provinsi yang mengalami penurunan yaitu Sumatra Utara, Lampung, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Pada periode 2011-2015, rata-rata tenaga kerja tertinggi terletak pada provinsi Jawa Timur sebesar 19192615.4 juta orang. Tingginya tenaga kerja di Jawa Timur disebabkan banyaknya infrastruktur yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di daerah

tersebut. Kemudian tenaga kerja minimum terletak pada provinsi Papua Barat pada tahun 2011 yang nilainya 336588 juta orang.

4. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh negara itu sendiri dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya investsi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi yang akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan kata lain bahwa investasi tersebut akan terjadi penambahan output dan pendapatan pada faktor produksi sehingga akan meningkatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. 5
Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi Tahun 2011-2015
(Juta US\$)

NO	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Aceh	259.40	60.20	3636.40	5110.30	4192.41
2	Sumtara	1673.00	2550.30	5068.90	4223.90	4287.42
3	Sumbar	1026.20	885.30	677.80	421.10	1552.50
4	Riau	7462.60	5450.40	4874.30	7707.60	9943.00
5	Jambi	2134.90	1445.70	2799.60	908.00	3540.20
6	Sumsel	1068.90	2930.60	3396.00	7042.80	10944.10
7	Bengkulu	29.49	52.60	109.60	7.80	553.90
8	Lampung	824.40	304.20	1325.30	3495.70	1102.30
9	Kep.Bangka	514.40	533.50	608.20	615.50	1023.70
10	Kep. Riau	1370.40	43.50	417.70	28.50	612.10
11	DKI Jakarta	9256.40	8540.10	5754.50	17811.50	15512.72
12	Jawa Barat	11194.30	11384.00	9006.10	18726.90	26272.90
13	Jateng	2737.80	5797.10	12593.60	13601.60	15410.70
14	DIY	100.60	334.00	283.80	703.90	362.40

NO	Provinsi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
15	Jawa Timur	9687.50	21520.30	34848.90	38132.00	35489.80
16	Banten	4298.60	5117.50	4008.70	8081.30	10709.90
17	Bali	313.40	3108.00	2984.70	252.80	1250.40
18	NTB	42.30	45.40	1398.00	212.50	347.80
19	NTT	1.00	14.40	17.60	3.60	1295.70
20	Kalbar	1404.00	2811.00	2522.10	4320.80	6143.53
21	Kalteng	3376.00	4529.60	1835.30	980.40	1270.10
22	Kalsel	2118.30	3509.80	8299.20	2616.50	2060.40
23	Kaltim	6569.10	5889.30	16034.60	12859.00	9611.30
24	Sultar	331.60	678.50	66.80	83.00	270.60
25	Sulteng	2620.20	602.80	605.30	95.80	968.40
26	Sulsel	3986.30	2318.90	921.00	4949.60	9215.30
27	Sulgara	59.00	907.30	1261.60	1249.90	2015.40
28	Gorontalo	11.80	164.90	84.40	45.10	94.30
29	Sulbar	218.60	228.60	685.10	690.10	1103.80
30	Maluku	56.10	3.40	59.92	156.30	142.20
31	Malukutara	13.50	320.50	1114.90	100.00	48.23
32	Papua Barat	47.20	45.80	304.00	20.20	63.45
33	Papua	1378.90	54.70	584.30	249.90	1275.22

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I.Y 2016

Pada Tabel 4.5 menjelaskan bahwa realisasi penanaman modal dalam negeri Indonesia setiap provinsi relatif tidak stabil dikarenakan di setiap provinsi tersebut besar nilainya investasi tergantung pada proyek-proyek yang dikerjakan. Nilai rata-rata penanaman modal dalam negeri paling tinggi yaitu di provinsi Jawa Barat. Tingginya nilai penanaman modal dalam negeri di Jawa Barat tersebut karena terfokus pada sektor bidang usaha industri mineral non logam, sektor tersier, dan bidang usaha perdagangan atau reparasi. Kemudian nilai penanaman modal dalam negeri paling rendah yaitu berada pada provinsi Gorontalo. Rendahnya nilai penanaman modal dalam negeri di Gorontalo disebabkan beberapa perusahaan yang tidak memberikan LKPMnya, dan ada beberapa perusahaan yang mengalami pailit karena masalah internal perusahaan.

